

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH  
PADA PRAKTIK MANDIRI PENYEHAAT TRADISIONAL SANGKAL  
PUTUNG ATAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL  
DI KOTA BATAM**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat sarjana S-2  
Program Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh  
**Ronny Sutanto**

**NIM 24.C2.0060**

**kepada**

**FAKULTAS HUKUM & KOMUNIKASI  
UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

**2026**

## ABSTRAK

Pelayanan kesehatan tradisional merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional yang berkembang di masyarakat dan memiliki nilai sosial serta budaya. Salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah praktik sangkal putung, yaitu layanan penanganan gangguan tulang berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun keberadaannya diakui dalam sistem pelayanan kesehatan, praktik ini tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan pemerintah untuk menjamin legalitas, keamanan, mutu pelayanan, serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan praktik mandiri penyehat tradisional sangkal putung di Kota Batam, menganalisis pelaksanaan pengawasan pemerintah daerah terhadap praktik tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Kota Batam.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dan narasumber, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan kondisi empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mandiri penyehat tradisional sangkal putung di Kota Batam telah memiliki dasar pengaturan, namun masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Pengawasan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Batam dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pendataan, dan pemberian arahan, sedangkan pengawasan represif berupa pemberian sanksi belum berjalan secara optimal. Faktor yang memengaruhi pengawasan meliputi regulasi, kewenangan pemerintah, keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, kesadaran hukum penyehat tradisional, serta faktor sosial budaya masyarakat.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah terhadap praktik sangkal putung di Kota Batam telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Diperlukan penguatan pendataan, pembinaan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, dan optimalisasi mekanisme pengawasan untuk menjamin pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengawasan Pemerintah Daerah; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Sangkal Putung; Penyehat Tradisional; Perlindungan Hukum

## ABSTRACT

*Traditional health services are part of the national health system that develops in the community and have social and cultural values. One form of such service is the practice of butting the bone, which is a service to handle bone disorders based on knowledge and skills inherited from generation to generation. Although its existence is recognized in the health service system, this practice still requires government guidance and supervision to ensure legality, security, service quality, and legal protection for the community.*

*This study aims to determine the regulation of the independent practice of traditional sangkal putung health practitioners in Batam City, analyze the implementation of local government supervision of these practices, and identify factors that affect the implementation of supervision by the Batam City Government.*

*The research method used is a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. The research data consists of primary data obtained through interviews with informants and sources, as well as secondary data in the form of laws and regulations, literature, and previous research. Data analysis is carried out qualitatively by comparing empirical conditions in the field with applicable legal provisions.*

*The results of the study show that the independent practice of traditional sanitizer in Batam City has a regulatory basis, but there is still a gap between legal provisions and its implementation. Local government supervision through the Batam City Health Office is carried out through coaching, socialization, data collection, and providing directions, while repressive supervision in the form of sanctions has not been running optimally. Factors that affect supervision include regulations, government authority, limited resources, inter-agency coordination, legal awareness of traditional health, and socio-cultural factors of the community.*

*The conclusion of the study shows that local government supervision of the practice of denial of putung in Batam City has been implemented, but has not been fully effective. It is necessary to strengthen data collection, continuous coaching, cross-sector coordination, and optimize supervision mechanisms to ensure safe, quality, and legal protection for the community.*

**Keywords:** *Regional Government Supervision; Traditional Health Services; Sangkal Putung; Traditional Healers; Legal Protection*